



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN  
ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM  
TERHADAP BELANJA MODAL PADA  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**WINA AZHARI**  
NPM: 1515100169

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : WINA AZHARI  
**NPM** : 1515100169  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**JENJANG** : SI (STARA SATU)  
**JUDUL** : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA  
MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI  
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Medan, 30 April 2019

**KETUA PROGRAM STUDI**

**DEKAN**

  
(Anggi Pratama Nasution, S.E., M.Si)

  
(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

  
(Rahima Br. Purba, S.E., M.Si., AK., CA)

  
(Drs. Abdul Hasyim, BB, AK., M.M)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA  
Lengkap FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

**PERSETUJUAN UJIAN**

**NAMA** : WINA AZHARI  
**NPM** : 1515100169  
**PROGRAM STUDI** : AKUNTANSI  
**JENJANG** : S1 (STARA SATU)  
**JUDUL SKRIPSI** : PENGARUHPERTUMBUHAN EKONOMI,  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA  
MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

**MEDAN, 30 April 2019**

**KETUA PROGRAM STUDI**



(Anggi Pratama Nasution S.E.,M.Si)

**ANGGOTA I**

(Rahima Br. Purba, S.E.,M.Si.,AK.,CA)

**ANGGOTA II**

(Drs.Abdul Hasyim BB, AK.,MLM)

**ANGGOTA III**

(Oktarini Khamilah Siregar, S.E.,M.Si)

**ANGGOTA IV**

(Aulia, S.E.,M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : WINA AZHARI  
NPM : 1515100169  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL  
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalti non-eksklusif kepada unpub untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Penyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, April 2019  
Penulis



Wina Azhari

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : WINA AZHARI  
NPM : 1515100169  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI,  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA  
ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL  
PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUMATERA UTARA

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan dimasa yang akan mendatang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, April 2019  
Penulis



Wina Azhari



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Perwaj bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : WINA AZHARI  
 Tanggal Lahir : / 05 Juli 1996  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100169  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
 Kredit yang telah dicapai : 127 SKS, IPK 3.71  
 Permohonan mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul SKRIPSI	Persetujuan
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	<input checked="" type="checkbox"/>
Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	<input type="checkbox"/>
Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara	<input type="checkbox"/>

Permohonan disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda

  
 ( Ir. Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D. )

Medan, 25 September 2018

Pemohon,  
  
 ( Wina Azhari )

Nomor : .....  
 Tanggal : .....  
 Disahkan oleh :  
 Dekan  
  
 ( Dr. Surya Nita, S.P., M.Hum. )  
 Tanggal : 18 Agustus 2018  
 Disetujui oleh :  
 Ka. Pratama Nasution  
 ( Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si )

Tanggal : 25 September 2018  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I :  
  
 ( Rahmawati, S.P., S.H., M.Si, Ak., C.A )  
 Tanggal : 25 September 2018  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II :  
  
 ( Drs. Pradip, M.P.S., Ak., NM )

No. Dokumen: FM-LPMM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

mandiri  
Svāhiah

Transaksi Pembayaran

Rekening Sumber

Rekening

Data Pembayaran

Tanggal / Jam

Terminal

Jenis Pembayaran

Jumlah

Nama

Nomor

Institusi

Info 1

Info 2

No. Referensi

No. Transaksi

No. Struk

7081537741 - BSM NET BANKING KK MEDAN PANGBUD

24 Oct 2019 / 09:42:00

E78181695

AKADEMIK - UNIV PANCA BUDI FAK EKONOMI

4,502,500.00

MINA AZHARI

1515100169301

UNIVERSITAS PANCA BUDI

SOESAL SAINS 20162 AKUNTANSI S

TM1N7.TM1N8.TM1N9.TM1N10.TM1N11

000004502500

PT19114MHPAB

00002234

BANK SYARIAH MANDIRI  
Kantor Cabang Panca Budi  
24 Okt 2019  
ANITA  
Teller

Copyright © 2019. All Rights Reserved. Mandiri

No. 2109/PERP/BP/2019

Dinyatakan tidak ada sangkut paut dengan UPT. Perpustakaan

FM-BPAA-2012-041



Medan, 20 April 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAB Medan  
Di -  
Tempat.



Pemohonan Meja Hijau

Hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : WINA AZHARI  
Tgl. Lahir : Medan / 05 Juli 1996  
Orang Tua : AZHAR HAJI ACHMAD  
No. HP : 1515100169  
Jurusan : SOSIAL SAINS  
Bidang Studi : Akuntansi  
Alamat : 087882358183  
No. Rumah : JL. Klambir v No.28

Mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Aspek Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya dinyatakan :

- 1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- 3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
- 4. Melampirkan surat keterangan bebas laboratorium
- 5. Melampirkan pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- 6. Melampirkan foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- 7. Melampirkan pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- 8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- 9. Hard Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- 10. Melampirkan surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- 11. Telah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Media melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	650,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,250,000</b>

UK Termin ke-3an Rp

2.250.000  
4.500.000

Ukuran Toga : S

W/ 27/04/19



Hormat saya  
*Wina Azhari*  
WINA AZHARI  
1515100169

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
    - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
    - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- buat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



TEGUH WAHYONO, SE,MM.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 18/04/2019 08:33:12

"WINA AZHARI\_1515100169\_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi\_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- 150 wrds: 18721 <https://docplayer.info/90252824-Pengaruh-pertumbuhan-ekonomi-pendapatan-asli-daerah-dan-da...>
- 150 wrds: 13795 <https://wuliyah0.blogspot.com/2015/01/engaruh-pertumbuhan-ekonomi-pdb.html>
- 104 wrds: 13230 <https://docplayer.info/190192-Pengaruh-dana-alokasi-khusus-dan-dan-pendapatan-asli-daerah...>

other Sources:]

Processed resources details:

282 - Ok / 51 - Failed

other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:



Wikipedia Detected!

Google Books:



GoogleBooks Detected!

Ghostwriting services:



[not detected]

Anti-cheating:



[not detected]

Excluded Uris:

Included Uris:



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Dosen Pembimbing I : Rahima Br. Purba SE, M.Si, Ak, CA  
 Dosen Pembimbing II : Drs. Abdul Hasyim EB, Ak, M.M  
 Nama Mahasiswa : WINA AZHARI  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100169  
 Bidang Pendidikan : SI (Star-1)  
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Peran Perumbuhan Ekonomi, Pendekatan Asli Daerah dan  
 Dana Alokasi Umum Terhadap Beranja Modal Pada Kabupaten/  
 Kota di Provinsi Sumatera Utara

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
15-2019	Pembahasan & juklannya satu persatu sesuai dgn penemuan masalah. Daftar pustaka.		
18-2019	Pembahasan		
2019	acc sidag		
/			<p>Acc Sidag - 18/3-2019.</p>

Medan, 14 Maret 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan.



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : Rahima Br. Purba S.E., M.Si, AK, CA  
 Pembimbing II : Drs. Abdul Hasyim BB, Ak, M.M  
 Mahasiswa : WINA AZHARI  
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100169  
 Bidang Pendidikan : ST (stara-1)  
 Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendekatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Bekasja Modal Pada Kabupaten Kota Di Provinsi Sumatera Utara.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
-16	Perbaikan yg sayu beri tanda	Ah	
-16	Perbaikan	Ah	
-16	Perbaikan	Ah	
-16	Perbaikan	Ah	
-19	Ace pbb	Ah	

Medan, 16 April 2019

Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan

Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

: Universitas Pembangunan Panca Budi  
 : **SOSIAL SAINS**  
 Pembimbing I : Rahimca br. Purba, SE, M.si, AK, CA  
 Pembimbing II : Drs. Abdu Husayim BB, AK, MM  
 Mahasiswa : WINA AZHARI  
 Program Studi : Akuntansi  
 NIM / NPM : 1515100169  
 Pendidikan : Strata 1 (S1)  
 Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Rendahnya Awi Daerah (PAD) dan  
 Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten  
 di provinsi Sumatera Utara.

WAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2018	Perubahan judul. Kerangka konsep. Latar Belakang Masalah.		
2019	Metode Referensi		
2019	Acc Seminar Proposal		
			Acc Diseminasi Kom. 2019-2019 

Medan, 21 Januari 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh :

Dekan  
 Dr. Surya M.S., S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Program Studi : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : Rohima Br. Purba, SE, M.Si, AK, CA  
 Pembimbing II : Drs. Abdul Hasyim BB, AK, MM  
 Mahasiswa : WINA AZHARI  
 Program Studi : Akuntansi  
 NPM / Pokok Mahasiswa : 1515100169  
 Pendidikan : Stara 1 (S1)  
 Tugas Akhir/Skripsi : "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara"

WAGAL	PEBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1/01-19	Perbaikan: Y. Jaya Beri Toda	Am	
1-19	Perbaikan:	Am	
1-19	Perbaikan:	Am	
1-19	Perbaikan:	Am	
1/01-19	Ace 166	Am	

Medan, 30 Januari 2019  
 Diketahui/Disetujui oleh:  
 Dekan.



Dr. Surya Mita, S.H., M.Hum.

Hal : Permohonan Seminar Proposal

Medan, 04 Februari 2019  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Pancabudi  
Di -  
Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINA AZHARI  
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 05 Juli 1996  
Nama Orang Tua : AZHAR HAJI ACHMAD  
N. P. M : 1515100169  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Program Studi : Akuntansi  
No. HP : 082288495897  
Alamat : Jl. Klambir v no.28

Setang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Seminar Proposal dengan judul "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara".

Selanjutnya saya menyatakan :

Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, dengan perincian sebagai berikut :

Pembimbing 1 : Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.  
Pembimbing 2 : Drs Abdul Hasyim BB, Ak., MM

Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan, dengan perincian sbb :

1. [101] Ujian Seminar/Kolokium	: Rp.	450,000	Rp 450.000 / 02-19
Total Biaya	: Rp.	450,000	

Judul SKRIPSI :

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Utara

Diketahui/dibuat oleh :

W. Surya W. H. M. M. M. M.  
Dekan Fakultas Sosial Sains



Hormat saya

WINA AZHARI  
1515100169

Tetapan :

- 1.\* ) Coret yang tidak perlu ;
  - a. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ada bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Syariah Mandiri (BSM), atau bukti kwitansi Pembayaran dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- 2. Dibuat rangkap 3 ( tiga ) : - Untuk Fakultas - untuk Rektorat - Mhs. Ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO BOX 1099 Medan  
htt://www.pancabudi.ac.id  
Medan – Sumatera Utara - Indonesia

Nomor. : **4877 / 16 / FSSA / 2019**  
Lampiran : 1 (satu) Berkas.  
Perihal : **Tugas Menghadiri Ujian Skripsi.**

Kepada Yth. : Saudara

1. Ketua : Anggi Pratama Nst, SE.,M.Si
2. Anggota - I : Rahima br. Purba, SE.,M.Si., Ak.,CA.
3. Anggota - II : Drs Abdul Hasyim BB, Ak., MM
4. Anggota - III : Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si
5. Anggota - IV : Aulia, SE., MM

di-

Medan.


Dengan hormat, bersama surat ini kami menugaskan saudara untuk menghadiri Ujian Meja Hijau Mahasiswa/i :

Nama : **WINA AZHARI**  
NPM : 1515100169  
Fakultas / Prodi : Sosial Sains / Akuntansi  
Hari / Tanggal : Senin / 13 Mei 2019  
J a m. : 10.00 Wib  
Ruangan : Seminar Fakultas Sosial Sains

Judul Skripsi: ***Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara***

Demikianlah kami sampaikan, atas kehadiran saudara di ucapkan terima kasih.

Medan, 10 Mei 2019  
D e k a n,

  
**Dr. Surya Nita, SH.,M.Hum**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. 2) untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif/kuantitatif dengan metode pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum dengan pendekatan secara matematis dalam menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian t hitung menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal. Hasil penelitian f hitung menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

**Kata Kunci :** Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal.



## **ABSTRACT**

*This study aims at : 1) to find out how much influence the economic growth of local revenue and general allocation funds partially have a significant effect on capital expenditure in district/cities in Nort Sumatra. 2) to find out how influence the economic growth of local revenue and general allocation funds simultaneously have a significant effect on capital expenditure in district/cities in Nort Sumatra. This study uses an assosiative/quantitative method of influencing economic growth in regional income and general allocation funds with a predictive approach and explaining in answering the problem statement. The results of the t count study show that the variabel economic growth and general allocation funds have a partial effect on expenditure, while regional income have not partial effect on capital expenditure. This results of the f arithmetic show that the variabel of economic growth, regional income and general allocation funds have a simultaneous effect on capital expenditure.*

**Keywords :** *Economic Growth, Regional Income, General Allocation Funds, and Capital Expenditure.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provisinsi Sumatera Utara”**. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Stara Satu (S-1) Program Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E., M.M selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Rahima Br. Purba S.E., M.Si., AK, CA dan Bapak Drs. Abdul Hasyim BB, AK., M.M selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran serta arahan dalam penulisan dan perbaikan skripsi.
5. Ucapan Terimakasih yang teristimewa teruntuk kepada ayah tercinta Azhar Haji Achmad dan umi tersayang Wan Sakinah, serta kepada kakakku Cut

Mutia Azsafira S.E, abang iparku Andry Ichsan, S.T, abangku Agus Maulidy S.H, dan adik-adikku yang senantiasa mendoakan, mendukung baik moral dan material, mencurahkan kasih sayang serta semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Teman – teman terdekatku Sri Inda Aryuni, Ruji Sutinah dan Try Dessy Ratna Sari yang membantu dan memberikan semangat sekaligus motivasi untuk memberikan hasil yang terbaik dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Teman – teman Akuntansi Pagi angkatan 2015, terkhusus kepada teman seperjuangan Riza Septika Sari, Rezky Annisa, Yayuk Wulandari dan Herliani yang selalu setia menemani dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pihak – pihak terkait yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih atas banyaknya ilmu serta pelajaran yang bermanfaat dalam menambah pengalaman serta pemahaman penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi kepada peneliti selanjutnya, Amin.

Medan, 30 April 2019

Wina azhari  
NPM: 1515100169

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Perumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Keaslian Penelitian .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Landasan Teori .....	13
1. Pertumbuhan Ekonomi .....	13
2. Pendapatan Asli Daerah.....	15
3. Dana Alokasi Umum .....	21
4. Belanja Modal.....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	28
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Hipotesis .....	31
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel .....	33
D. Definisi Operasional Variabel .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	35
F. Teknik Analisis Data .....	36
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	42
1. Sejarah Singkat Perkembangan Sumatera Utara .....	42
2. Perekonomian Sumatera Utara .....	45

3. Visi dan Misi.....	46
4. Deskripsi Variabel Penelitian .....	47
5. Statistik Deskriptif .....	52
6. Pengujian Asumsi Klasik.....	54
7. Pengujian Test Goodness Of Fit .....	57
B. Pembahasan .....	61
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal.....	61
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal....	61
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal.....	62

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan .....	63
B. Saran .....	64

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BIODATA**

## **LAMPIRAN**

## Daftar Tabel

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Ekonomi .....	4
Tabel 1.2 Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah .....	5
Tabel 1.3 Data Dana Alokasi Umum .....	6
Tabel 1.4 Data Belanja Modal .....	7
Tabel 2.1 Jenis dan Komponen Belanja Modal .....	26
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1 Skedul jadwal peneliti .....	32
Tabel 3.2 Daftar Sampel Kabupaten/Kota Sumatera Utara .....	33
Tabel 3.3 Operasional Variabel.....	35
Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Realisasi Penerimaan Pemerintah .....	47
Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah Realisasi Penerimaan Pemerintah .....	48
Tabel 4.3 Dana Alokasi Umum Raelisasi Penerimaan Pemerintah .....	50
Tabel 4.4 Belanja Modal Realisasi Penerimaan Pemerintah .....	51
Tabel 4.5 Statistik Deskriptif .....	52
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas .....	55
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi .....	57
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	57
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik .....	59
Tabel 4.10 Hasil Uji t statistik.....	59
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	60

## Daftar Gambar

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	27
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram .....	54
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot .....	54
Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot.....	56

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan. Dengan ditetapkannya undang-undang No. 23 Tahun 2014 di suatu daerah memiliki “Asas otonomi yang artinya prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonomi daerah”.

Hal ini menimbulkan peningkatan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan (penyedia barang publik dan pembangunan ekonomi) di bidang pendidikan yang merupakan unsur esensial dalam pembangunan daerah dan menjadi salah satu kebutuhan penduduk. Namun, kemampuan daerah mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan sangat terbatas karena peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 pasal 1 ayat (1) “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Pasal 1 ayat (2) “Pedoman penyusunan APBD adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penerapan APBD”.

Tingkat pertumbuhan ekonomi salah satu tujuan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat. Halim dalam Ravi Dwi



(2010:32) “Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari pada apa yang dicapai dari masa sebelumnya”.

Sedangkan menurut P. Eko Prasetyo (2009) “Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa atau pembangunan ekonomi suatu bangsa”. Infrastruktur dan sarana prasarana di daerah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya dengan aman dan nyaman, maka akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya semakin meningkat dan infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.

Perbaikan kesejahteraan terjadi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk dalam pembangunan ekonomi. Kenyataan yang terjadi di pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal, dapat dilihat dari kecilnya jumlah belanja modal yang dianggarkan dengan total anggaran belanja daerah. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak positif terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014, “Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri”. Pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan Pendapatan asli daerah diharapkan dapat

meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga pemerintah dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang baik.

Setiap daerah memiliki kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini, maka pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 “Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana alokasi umum diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan pendapatan asli daerah. Dengan adanya dana alokasi umum diharapkan perbedaan kemampuan keuangan daerah yang maju dengan daerah yang berkembang dapat diperkecil.

Di Sumatera Utara merupakan tempat wisata yang sering dikunjungi wisatawan mancanegara, dengan banyak kunjungan pariwisata hal ini akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota tersebut. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka belanja modal akan meningkat dan tidak akan ada lagi ketergantungan pada Pemerintah Pusat. Dana APBD di Sumatera Utara harus dipacu khususnya untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang menyangkut kepentingan masyarakat. Apalagi dana APBN yang tidak terpakai di daerah itu sendiri akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerahnya. Dimana klasifikasi data pertumbuhan ekonomi,

pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi  
Kabupaten/Kota Pada Sumatera Utara  
(Dalam Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Kab Langkat	27.769.540.000	30.351.770.000	33.949.470.000	37.023.330.000
Kab Nias	2.430.720.000	2.669.900.000	2.996.280.000	3.233.750.000
Kab Tapanuli Selatan	9.308.330.000	10.105.980.000	10.946.770.000	11.983.060.000
Kab Simalungun	25.338.490.000	27.237.460.000	30.186.080.000	32.860.290.000
Kab Asahan	24.302.720.000	26.541.790.000	29.206.690.000	32.023.190.000
Kab Karo	13.817.090.000	15.150.360.000	16.728.420.000	18.060.750.000
Kab Dairi	6.268.080.000	6.823.160.000	7.433.620.000	8.044.630.000
Kota Binjai	7.643.410.000	8.447.410.000	9.077.470.000	9.857.850.000
Kota Tebing Tinggi	3.934.670.000	4.304.350.000	4.727.480.000	5.123.220.000
Kota Sibolga	3.426.510.000	3.827.170.000	4.262.850.000	4.644.670.000

Sumber : Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel Pertumbuhan Ekonomi dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2014-2017 mengalami perubahan setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Kabupaten Langkat selama kurun waktu 4 tahun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah pada Kabupaten Nias selama kurun waktu 4 tahun. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka semakin cepat proses penambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menurun, maka pendapatan daerah akan mengalami penurunan sehingga pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu.

Tabel 1.2 Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten/Kota Pada Sumatera Utara

(Dalam Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Kab Langkat	107.811.975.547	122.715.359.910	132.673.213.413	30.094.966.025
Kab Nias	65.082.210.841	70.892.590.608	82.840.434.009	63.612.593.279
Kab Tapanuli Selatan	95.588.202.103	109.349.451.811	76.640.675.841	47.990.183.868
Kab Simalungun	96.390.208.715	111.893.282.770	132.560.800.826	33.014.568.195
Kab Asahan	91.468.218.559	98.279.308.429	52.170.348.430	30.373.280.934
Kab Karo	72.914.095.471	87.644.277.141	99.913.302.299	40.831.129.979
Kab Dairi	53.525.854.131	58.791.848.521	68.003.241.760	37.587.326.567
Kota Binjai	71.967.137.635	78.327.792.811	97.339.497.584	27.476.734.295
Kota Tebing Tinggi	74.515.273.852	82.410.053.810	94.058.491.717	48.469.208.035
Kota Sibolga	52.922.967.441	60.486.785.863	68.537.902.708	34.557.335.546

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel realisasi Pendapatan Asli Daerah dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara kurun waktu 2014-2017 mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 mengalami penurunan pendapatan asli daerah pada Kabupaten Langkat sebesar Rp. 30.094.966.025, Kabupaten Nias sebesar Rp.63.612.593.279, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp.47.990.183.868, Kabupaten Simalungun Rp. 33.014.568.195, Kabupaten Asahan sebesar Rp. 30.373.380.934, Kabupaten Karo Sebesar Rp. 40.831.129.979, Kabupaten Dairi sebesar Rp.37.587.326.567, Kota Binjai sebesar Rp.27.476.734.295, Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.48.469.208.035, dan Kota Sibolga sebesar Rp.34.557.335.546.

Pendapatan asli daerah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Di Tahun 2017 Pemerintah Daerah sangat bergantung pada dana transfer baik berupa dana perimbangan maupun dana bagi hasil dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak dapat membiayai daerahnya sendiri.

Tabel 1.3 Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota  
Pada Sumatera Utara

(Dalam Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Kab Langkat	1.039.650.946.000	1.099.486.754.000	1.200.481.463.000	700.280.826.000
Kab Nias	347.698.829.000	365.879.173.000	429.582.510.000	244.748.649.576
Kab Tapanuli Selatan	572.097.968.000	592.764.058.000	654.669.272.000	327.334.626.000
Kab Simalungun	1.077.985.764.000	1.084.973.726.000	1.230.816.187.000	717.976.084.000
Kab Asahan	795.350.930.000	817.746.952.000	891.149.644.000	519.837.726.000
Kab Karo	686.834.562.000	697.458.392.000	751.581.176.000	432.159.157.800
Kab Dairi	532.723.259.000	560.602.194.000	623.702.235.000	356.030.010.400
Kota Binjai	526.069.678.000	541.895.577.000	574.469.158.000	287.234.568.000
Kota Tebing Tinggi	385.030.433.000	400.236.724.000	432.437.231.464	250.514.423.065
Kota Sibolga	371.812.825.000	380.075.078.000	412.805.887.000	230.483.276.300

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel Dana Alokasi Umum dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara kurun waktu selama 2014-2017 mengalami perubahan setiap tahunnya. Pada pemberian dana alokasi umum terjadi penurunan pada tahun 2017 di Kabupaten Langkat sebesar Rp.700.280.826.000, Kabupaten Nias sebesar Rp. 244.748.649.576, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp.327.334.626.000, Kabupaten Simalungun sebesar Rp.717.976.084.000, Kabupaten Asahan sebesar Rp.519.837.726.000, Kabupaten Karo sebesar Rp.432.159.157.800, Kabupaten Dairi sebesar Rp.356.030.010.400, Kota Binjai sebesar Rp.287.234.568.000, Kota Tebing Tinggi sebesar Rp.250.514.423.065, dan Kota Sibolga sebesar Rp.230.483.276.300.

Penurunan dana alokasi umum terjadi karena adanya devisa APBN yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut berimbas pada perhitungan ulang alokasi dana kegiatan setiap dinas. Namun begitu, rasionalisasi tidak akan menyentuh program-program prioritas, contohnya seperti pembangunan infrastruktur terkecuali kegiatan-kegiatan kurang penting seperti sosialisasi atau kunjungan kerja yang akan paling di efisiensi.

Tabel 1.4 Belanja Modal  
Kabupaten/Kota Pada Sumatera Utara

(Dalam Rupiah)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
Kab Langkat	329.542.794.732	497.257.525.402	626.295.461.427	88.205.126.357
Kab Nias	158.098.310.646	194.330.739.832	227.559.502.344	14.158.331.979
Kab Tapanuli Selatan	222.350.225.386	303.915.012.639	307.152.296.664	28.273.492.918
Kab Simalungun	226.370.774.680	185.676.905.078	210.953.244.334	66.934.738.889
Kab Asahan	424.188.251.104	227.438.269.630	237.676.952.256	16.608.028.489
Kab Karo	155.665.020.656	300.098.182.224	231.098.360.315	177.085.388
Kab Dairi	155.712.106.277	180.098.060.210	217.941.187.120	5.151.073.950
Kota Binjai	153.284.846.162	174.972.076.727	202.943.191.598	17.052.109.995
Kota Tebing Tinggi	163.582.124.045	158.487.242.001	203.355.262.407	51.822.942.740
Kota Sibolga	105.880.982.815	126.724.781.839	185.382.143.913	13.193.244.825

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel Belanja Modal dari 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara kurun waktu 2014-2017 mengalami perubahan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 terjadi penurunan di Kabupaten Langkat sebesar Rp.88.205.126.357, Kabupaten Nias sebesar Rp.14.158.331.979, Kabupaten Tapanuli selatan sebesar Rp. 28.273.492.918, Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 66.934.738.889, Kabupaten Asahan sebesar Rp.16.608.028.489, Kabupaten Karo sebesar Rp. 177.085.388, Kabupaten Dairi sebesar Rp. 5.151.073.950, Kota Binjai sebesar Rp. 17.052.109.995, Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 51.822.942.740, dan Kota Sibolga sebesar Rp.13.193.244.825.

Di tahun 2017 pemerintah daerah lebih banyak membuat belanja yang sifatnya birokratis seperti menambah pegawai dan administrasi, sementara belanja-belanja yang bersifat birokratis akan memberikan dampak minim ke ekonomi daerah. Belanja modal perlu didorong untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam rentang sesuai APBN. Penurunan belanja modal akan mempengaruhi pembangunan atau perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, serta penambahan atau perbaikan dan mesin.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pertumbuhan ekonomi di sektor jasa khususnya pada pariwisata, dengan judul : **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah yang akan dibahas penulis adalah :

- a. Terjadinya penurunan yang drastis belanja modal pada tahun 2017 di Kabupaten Karo sebesar Rp. 177.085.388, Kabupaten Dairi sebesar Rp.5.151.073.950, dan Kota Sibolga sebesar Rp. 13.193.244.825. Sehingga penurunan akan berdampak pada aset daerah yang ada di kabupaten/kota tersebut, seperti tanah dan peralatan.
- b. Terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 di Kabupaten Langkat sebesar Rp. 30.094.966.025, Kabupaten Nias sebesar Rp. 63.612.593.279, Kabupaten Tapanuli Selatan sebesar Rp. 47.990.183.868, Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 33.014.568.195, Kabupaten Asahan sebesar Rp. 30.373.380.934, Kabupaten Karo sebesar Rp. 40.831.129.979, Kabupaten Dairi sebesar Rp. 37.587.326.567, Kota binjai sebesar Rp. 27.476.734.295, Kota Tebing Tinggi sebesar Rp. 48.469.208.035, dan Kota sibolga sebesar Rp. 34.557.335.546. Hal ini akan berdampak pada pendapatan daerah tersebut, sehingga pemerintah daerah tidak dapat membiayai daerahnya sendiri.

## **2. Batasan Masalah**

Mengingat masalah yang akan dihadapi agar penelitian ini lebih terarah dan pembahasannya tidak menyimpang maka penulis membatasi pembahasan pada Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli daerah dan Dana ALokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tahun 2014-2017.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
3. Apakah Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?



## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
- d. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah untuk menjadi pertimbangan dalam Anggaran Belanja Modal Pemerintah dan memberikan masukan dalam upaya Pengelolaan APBD yang lebih baik.

b. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan Belanja Modal Pemerintah.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini akan menambah wawasan dan menjadi referensi bahan kajian dalam menambah ilmu pengetahuan terutama pada bidang akuntansi sektor publik yang berhubungan dengan Belanja Modal Pemerintah.

### **E. Keaslian Penelitian**

Pada penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fitria Megawati Sularno (2013) dengan waktu dan objek yang berbeda namun variabel dan alat analisis yang digunakan sama. Maka penelitian ini berusaha ingin mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian ini berjudul Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Persamaan dan perbedaan terletak pada:

1. Variabel penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan 3 variabel bebas (Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) dan 1 variabel terikat (Pengalokasian Anggaran Belanja Modal). Penelitian ini juga menggunakan 3 variabel bebas (Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum) dan 1 variabel terikat (Belanja Modal).

2. Jumlah observasi/data: Penelitian terdahulu menggunakan sampel sebanyak 23 Kabupaten/Kota dan data pada tahun 2007 sampai 2011. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 10 Kabupaten/Kota dan data pada tahun 2014 sampai 2017.
3. Waktu penelitian: Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2013 sedangkan penelitian ini tahun 2019.
4. Lokasi penelitian: Lokasi penelitian terdahulu dilakukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Jawa Barat, sedangkan penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan *output* dalam waktu jangka panjang, apabila kegiatan ekonomi yang dihasilkan tambah besar maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi kesejahteraannya meskipun terdapat indikator lainnya. Badan Pusat Statistik (2010:3) “Indikator makro tersebut diantaranya adalah produk domestik regional bruto”.

Menurut Putra (2009) “Pertumbuhan ekonomi ialah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat”. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi dari satu periode, berarti jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikut yang artinya jika produktivitas dari faktor-faktor yang dimasukkan dalam produksi menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat.

Badan Pusat Statistik (2010:1) “Proses pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah upaya meningkatkan kapasitas perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya akan mendorong terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat”.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi sering diukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB). Badan Pusat Statistik (2010:5) “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di

dalam suatu wilayah atau daerah pada periode tertentu (biasanya satu tahun) tanpa memperhitungkan kepemilikan”.

Perhitungan produk domestik regional bruto dibedakan menjadi dua, yaitu produk domestik regional bruto atas dasar harga merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan setiap tahun, dan dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi.

Sedangkan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan memakai harga yang berlaku pada tahun tertentu sebagai tahun dasar, dan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Menurut Badan Pusat Statistik (2010:5) menyatakan bahwa “Perhitungan produk domestik regional bruto dapat dilakukan dengan tiga pendekatan metode langsung yaitu:

- 1) Pendekatan produksi adalah menghitung nilai tambah dari barang dan jasa oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi *output* dari masing-masing sektor ekonomi dengan biaya antaranya.pendekatan ini merupakan pendekatan nilai tambah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi dari input. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa faktor produksi atas ikut sertanya dalam dalam proses produksi.
- 2) Pendekatan pendapatan adalah nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi dihitung dengan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksi yaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Untuk sektor pemerintahan dan usaha-usaha yang sifatnya tidak mencari untung, surplus usaha tidak diperhitungkan. Surplus usaha seperti bunga, sewa tanah dan keuntungan. Metode pendapatan ini banyak digunakan pada sektor pemerintahan seperti jasa .
- 3) Pendekatan pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir barang dan jasa di wilayah domestik. Produk Regional Domestik dihitung dengan cara menghitung komponen pengeluaran akhir yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto. Secara umum pendekatan ini dilakukan dengan cara :
  - a) Metode pendekatan penawaran yang terdiri dari metode arus barang dan metode penjualan eceran.
  - b) Metode pendekatan permintaan yang terdiri dari pendekatan survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga, metode data anggaran

belanja, metode *blance sheet*, metode statistik perdagangan luar negeri".

Pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dengan kenaikan *output* (Produk Domestik Bruto) dan pendapatan riil per kapita bukan satu-satunya sasaran di negara berkembang, namun kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan *output* perlu dilakukan dengan upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mendukung tujuan kebijakan pembangunan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dalam sektor jasa tidak hanya barang yang dapat diperjual belikan namun jasa juga sapat diperjual belikan seperti asuransi, travel, guru, dan akuntan publik. Pertumbuhan ekonomi dalam sektor jasa mampu meningkatkan kualitas SDM Indonesia, banyak membutuhkan tenaga kerja manusia sehingga mengurangi pengangguran dan menambah pendapatan Negara.

## **2. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah dan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. pendapatan asli daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai otonomi daerah dan dengan potensi sebagai perwujudan desentralisasi.

Defenisi Pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri". Menurut Halim dan Kusufi (2012:101) "Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai

sumber utama pendapatan daerah yang dipergunakan daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya dilihat dari perspektif yang lebih luas, tidak hanya ditinjau dari segi daerah tetapi dapat dilihat dari kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan asli daerah, dianggap sebagai alternatif untuk memperoleh tambahan dana yang dapat digunakan untuk keperluan pengeluaran daerahnya sendiri seperti keperluan rutin. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan hal yang dikehendaki bagi setiap daerah.

Dengan ditetapkannya pasal 285 Undang-undang No.23 Tahun 2014 menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

**a. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kewajiban yang harus dibayar oleh daerah yang terutang tanpa meminta imbalan secara langsung dan memiliki unsur paksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah bahwa “ Iuran yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. H. Mohammad Zain (2010) mengemukakan “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai berikut:

1) Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang menginap dengan fasilitas yang tersedia.

2) Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan minuman disediakan dengan dipungut bayaran.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan yang ditonton oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah alat atau media yang menurut ragan dan corak ragamnya digunakan untuk komersial.

5) Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga

listrik dengan ketentuan di wilayah tersebut. Penerangan jalan dibayarkan oleh pemerintah.



#### 6) Pajak Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan bahan galian golongan c merupakan pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahan galian golongan c seperti batu tulis, batu kapur dan batu apung.

#### 7) Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik disediakan dengan pokok usaha maupun dengan suatu usaha.

Selain jenis pajak, peraturan daerah pemerintah kabupaten/kota menetapkan jenis pajak lainnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Penetapan jenis pajak lainnya harus bersifat spesifik dan potensial daerah.

### **b. Retribusi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa “Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan yakni :

#### 1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

## 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

## 3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.

### **c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan**

Penyebab diberlakukannya otonomi daerah merupakan campur tangan pemerintah dalam pengelolaan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan kekayaan daerah berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sektor industri. Dengan adanya otonomi daerah maka daerah dapat mengelola kekayaan daerahnya seoptimal mungkin dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Undang-undang mengizinkan pemerintah daerah untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi bagi daerah sehingga dapat menunjang kemandirian daerah dalam pembangunan perekonomian daerah.

Jenis pendapatan ini dibagi menjadi beberapa yaitu:

1. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara/Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta.

**d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah**

Lain-lain pendapatan yang sah dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dan diupayakan oleh daerah dengan cara yang wajar tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Pendapatan ini bisa dilakukan dengan melakukan pinjaman kepada pemerintah pusat, pinjaman kepada lembaga keuangan dan non keuangan, pinjaman kepada masyarakat, dan juga bisa menerbitkan obligasi daerah.

Jenis-jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut:

1. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pendapatan denda pajak.
9. Pendapatan denda retribusi.
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
11. Pendapatan dari pengembalian.

12. Fasilitas sosial dan fasilitas umum.
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan .
15. Hasil pengelolaan dana bergulir.

Kendala utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang rendah, dilain pihak menyebabkan pemerintah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah.

### **3. Dana Alokasi Umum**

Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah yang bersifat "*block grant*", artinya daerah diberi keleluasaan dalam penggunaan yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah bertujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Dana alokasi umum dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 290 ayat (1) "Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi".

Anggiat (2009:16) "Dana alokasi umum merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya didalam rangka pelaksanaan desentralisasi". Kebijakan dana

alokasi umum merupakan instrumen penyeimbang antar daerah, sebab tidak semua daerah memiliki struktur dan kemampuan fiskal yang sama.

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antar pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan transfer yang cukup signifikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara leluasa dapat digunakan untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Ada empat tahapan perhitungan dana alokasi umum, yaitu:

- a. Tahapan akedemis merupakan konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula dana alokasi umum dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dalam tujuan untuk memperoleh kebijakan perhitungan dana alokasi umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.
- b. Tahapan administrasi merupakan tahapan yang dilakukan oleh Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait data dasar perhitungan dana alokasi umum termasuk kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemitakhiran.
- c. Tahapan teknis merupakan pembuatan simulasi penghitungan dana alokasi umum yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI berdasarkan undang-undang dengan menggunakan data yang tersedia dan memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.
- d. Tahapan politis merupakan perhitungan dan alokasi dana alokasi umum antara Pemerintah dengan Panitia Kerja Belanja Daerah, Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi mendapatkan persetujuan

hasil perhitungan.

Dalam rangka tercapainya objektivitas dan keadilan dalam pembagian dana alokasi umum kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana perimbangan. Pemerintah daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa pendapatan asli daerah, pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dana alokasi umum untuk satu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadaan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah yang formula dan perhitungan dana alokasi umumnya ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto.
- b. Proporsi dana alokasi umum antar provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antar bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi kabupaten/kota.
- c. Dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.

Sebagian besar pengeluaran baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan terutama dana alokasi umum. Menurut Halim dan Kusufi

(2012) “kelompok pendapatan berupa pendapatan transfer ini digolongkan menjadi:

- a. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan):
  1. Dana Bagi Hasil Pajak
  2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
  3. Dana Alokasi Umum
  4. Dana Alokasi Khusus
- b. Transfer Pemerintah Pusat (Lainnya):
  1. Dana Otonomi Khusus
  2. Dana Penyesuaian
- c. Transfer Pemerintah Provinsi:
  1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
  2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya”

#### **4. Belanja Modal**

Belanja modal adalah suatu pembentukan modal yang bersifat menambah aset tetap/investasi yang memberikan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat untuk mempertahankan atau menambah masa manfaat dan meningkatkan kapasitas serta kualitas aset.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 “Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 untuk pembanguana dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah”.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, “Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”. Menurut Erlina, et,al (2015:155) “Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud”. Sedangkan menurut Halim dan Kusufi (2012:107) “Belanja modal merupakan anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.

Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi-potensi penerimaan daerah yang baru. Belanja yang baik merupakan dengan semakin besarnya porsi belanja modal sebagai bagian dari total belanja daerah. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah sesuai dengan anggaran dan pelayanan publik yang dapat memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menurunkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun pemerintah daerah biasanya melakukan dengan cara membeli aset tetap.

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi atas minimal kapasitas aset tetap dan aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang atau aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang dan aset yaitu:

1. Pengeluaran anggaran belanja modal mengakibatkan bertambahnya aset atau bertambahnya masa manfaat dan umur ekonomis aset berkenaan.



2. Pengeluaran anggaran belanja modal mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja atau volume aset.
3. Memenuhi nilai minum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Untuk pengadaan peralatan dan mesin batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp. 300.000,-
  - b. Untuk pembangunan dan pemeliharaan gedung bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp. 10.000.000,-
4. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan atau dipasarkan kepada masyarakat diluar pemerintah.

Tabel 2.1

## Jenis belanja modal beserta komponen-komponennya

Jenis belanja modal	Komponen biaya dalam belanja modal
Belanja modal tanah	1) Belanja modal pembebasan tanah 2) Belanja modal pembayaran honor tim tanah 3) Belanja modal pembuatan sertifikat tanah 4) Belanja modal pengurangan dan pematangan tanah 5) Belanja modal biaya pengukuran tanah
Belanja modal gedung dan Bangunan	6) Belanja modal perjalanan pengadaan tanah 1) Belanja modal bahan baku gedung dan bangunan 2) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelolaan teknis gedung dan bangunan 3) Belanja modal sewa peralatan gedung dan bangunan 4) Belanja modal perencanaan dan pengawasan gedung dan bangunan 5) Belanja modal perizinan gedung dan bangunan 6) Belanja modal honor perjalanan gedung dan bangunan
Belanja modal peralatan dan mesin	7) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran bangunan lama gedung dan bangunan 1) Belanja modal bahan baku peralatan dan mesin 2) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis peralatan dan mesin 3) Belanja modal sewa peralatan dan mesin

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4) Belanja modal perencanaan dan pengawasan peralatan dan mesin</li> <li>5) Belanja modal perizinan peralatan dan mesin</li> <li>6) Belanja modal pemasangan peralatan dan mesin</li> <li>7) Belanja modal honor perjalanan peralatan dan mesin</li> </ol>
Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belanja modal bahan baku jalan dan jembatan</li> <li>2) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengola teknis jalan dan jembatan</li> <li>3) Belanja modal sewa peralatan jalan dan jembatan</li> <li>4) Belanja modal perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan</li> <li>5) Belanja modal perizinan jalan dan jembatan</li> <li>6) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran penggunaan lama jalan dan jembatan</li> <li>7) Belanja modal honor perjalan jalan dan jembatan</li> <li>8) Belanja modal bahan baku irigasi dan jaringan</li> <li>9) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengola teknis irigasi dan jaringan</li> <li>10) Belanja modal sewa peralatan irigasi dan jaringan</li> <li>11) Belanja modal perencanaan dan pengawasan irigasi dan jaringan</li> <li>12) Belanja modal perizinan irigasi dan jaringan</li> <li>13) Belanja modal pengosongan dan pembongkaran penggunaan lama jalan dan jembatan</li> <li>14) Belanja modal honor perjalanan irigasi dan jaringan</li> </ol>
Belanja modal fisik lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Belanja modal bahan baku fisik lainnya</li> <li>2) Belanja modal upah tenaga kerja dan honor pengola teknis fisik lainnya</li> <li>3) Belanja modal sewa peralatan fisik lainnya</li> <li>4) Belanja modal perencanaan dan pengawasan fisik lainnya</li> <li>5) Belanja modal perizinan fisik lainnya</li> <li>6) Belanja modal jasa konsultan fisik lainnya</li> </ol>

Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.2 daftar penelitian sebelumnya**

No	Nama/Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Pungky Ardhani (2011) Universitas Diponegoro Semarang	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	1.Pertumbuhan Ekonomi 2.Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Dana Alokasi Umum (DAU) 4.Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja modal. Sedangkan, Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
2	Arif Purnama (2014) Universitas Muhammadiyah Surakarta	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Periode 2012-2013	1.Dana Alokasi Umum (DAU) 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 4. Luas Wilayah	Belanja Modal	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal. Sedangkan pendapatan asli daerah dan luas wilayah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap alokasi anggaran belanja modal.
3	Fitria Megawati Sularno (2013)	Pengaruh Pertumbuhan	1.Pertumbuhan Ekonomi	Pengalokasian Anggaran	Regresi Linier	Hasil penelitian menunjukkan

	Universitas Widyatama	Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)	2.Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3.Dana Alokasi Umum (DAU)	Belanja Modal	Berganda	bahwa Pertumbuhan Ekonomi dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
4	Deva Yoga Permana (2013) Universitas Diponegoro Semarang	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Semarang).	1.Pertumbuhan Ekonomi 2.Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Dana Alokasi Umum (DAU) 4.Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pengalokasian Anggaran Belanja Modal	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

### C. Kerangka Konseptual

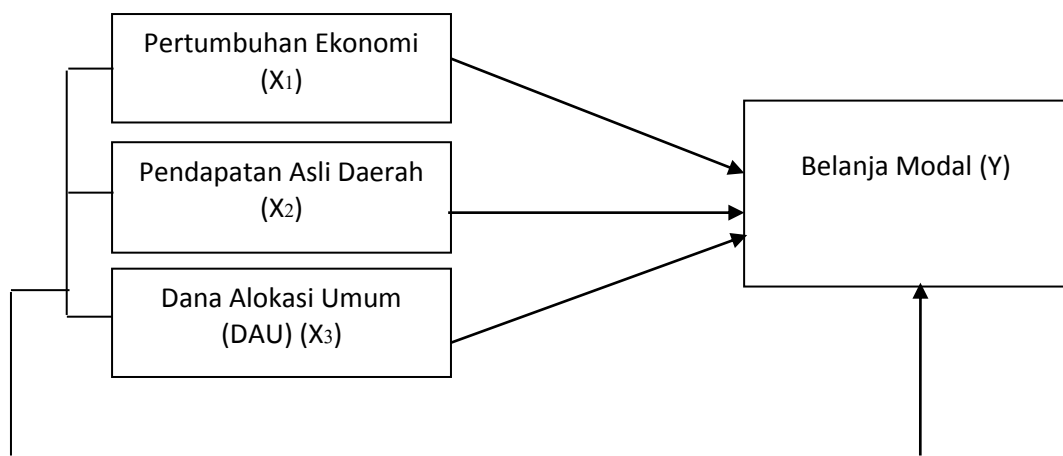
Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan pemerintah daerah untuk membangun ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada. P. Eko Prasetyo (2009) “Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur bagi kemajuan dan perkembangan suatu bangsa atau pembangunan ekonomi suatu bangsa”. Pendapatan Asli Daerah mempunyai peran dalam pelaksanaan otonomi daerah guna untuk mencapai dalam tujuan utama penyelenggaraan otonomi

daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pelayanan publik ditunjukkan melalui sarana dan prasarana yang memadai untuk membuat masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari secara aman dan nyaman serta berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin meningkat.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN dengan dialokasikan bertujuan untuk membiayai pemerataan keuangan antar daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran untuk pelaksanaan desentralisasi, data dana alokasi umum didapatkan dari laporan APBD kabupaten/kota di daerah tersebut.

Ardhani (2011) “Pemerintah daerah dapat menggunakan dana perimbangan keuangan Dana Alokasi Umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal”.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan sebelumnya kerangka konseptual merupakan konsep untuk menjelaskan dan menunjukkan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti. Ruang lingkup penulisan ini adalah pada provinsi Sumatera utara. Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

#### **D. Hipotesis**

Menurut Rusiadi (2014:75) menyatakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis”. Atas dasar konseptual di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
2. Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
3. Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
4. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian asosiatif/kuantitatif. Menurut Rusiadi (2014:12), “Penelitian asosiatif/kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui derajat hubungan dan pola/bentuk pengaruh antar dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini maka akan dibangun suatu teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”.

#### B. Tempat dan Waktu Penelitian

##### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Dari website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dan [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).

##### 2. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan mulai dari bulan September 2018 sampai dengan April 2019, dengan format berikut:

**Tabel 3.1 Skedul Proses Penelitian**

No	Aktivitas	Bulan							
		Sept, 2018	Nov, 2018	Des, 2018	Januari, 2019	Febuari, 2019	Maret, 2019	April, 2019	
1	Pengajuan Judul								
2	Penyusunan Proposal								
3	Seminar Proposal								
4	Perbaikan Acc Proposal								
5	Pengolahan Data								
6	Penyusunan Skripsi								
7	Bimbingan Skripsi								

Sumber : Diolah Penulis, 2019

## C. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Peneliti mengambil populasi pada Provinsi Sumatera Utara dan dapat dilihat dari neraca laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rusiadi (2014:30) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

### 2. Sampel

Rusiadi (2014:31) “Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik pengambilan sampel merupakan purposive sampling yang artinya sampel diambil dengan memiliki kriteria-kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian ini dilihat dari kunjungan pariwisata ke Kabupaten/Kota, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sampel dapat dilihat dari laporan realisasi penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun 10 Kabupaten/Kota dalam sampel penelitian ini adalah:

Tabel 3.2 Daftar Sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota Sumatera Utara
1	Kabupaten Langkat
2	Kabupaten Nias
3	Kabupaten Tapanuli Selatan
4	Kabupaten Simalungun
5	Kabupaten Asahan
6	Kabupaten Karo
7	Kabupaten Dairi
8	Kota Binjai
9	Kota Tebing Tinggi
10	Kota Sibolga

Sumber : Diolah Penulis (2019)



### **3. Jenis Data**

Data yang akan digunakan penelitian ini adalah data kuantitatif Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

### **4. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang di lihat dari website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) laporan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara, periode data penelitian ini dari tahun 2014-2017.

## **D. Definisi Operasional Variabel**

### **1. Variabel Pebelitian**

Sugiyono (2014:38) “Variabel penelitian merupakan sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”. Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel bebas yaitu: variabel bebas pertama pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ), variabel bebas kedua pendapatan asli daerah ( $X_2$ ), variabel bebas ketiga dana alokasi umum ( $X_3$ ) dan variabel terikat yaitu belanja modal ( $Y$ ).

### **2. Defenisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel dari suatu faktor lainnya. Sugiyono (2014) “Operasional variabel merupakan suatu cara untuk mengukur suatu konsep dan bagaimana konsep harus diukur sehingga terdapat variabel-variabel yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi”. Defenisi operasional sebaiknya berasal dari konsep teori dan definisi yang ada di lapangan.

**Tabel 3.3 Operasional Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Definisi operasional</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala</b>
Pertumbuhan Ekonomi (X <sub>1</sub> )	Jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan suatu daerah. (BPS, 2010)	PDRB harga konstan	Rasio
Pendapatan Asli Daerah (X <sub>2</sub> )	Pendapatan yang diperoleh oleh daerah tersebut dari sumber daya yang dimilikinya sendiri. (UU No. 23 Tahun 2014)	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rasio
Dana Alokasi Umum (X <sub>3</sub> )	Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (Anggiat, 2010)	Jumlah Dana Alokasi Umum	Rasio
Belanja Modal (Y)	Pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PSAP No. 02 Tahun 2010)	Jumlah Belanja Modal	Rasio

Sumber: Diolah Penulis, 2019

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dokumentasi dari website [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id) dan [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) dapat dikumpulkan dan diolah data dari informasi terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

## **F. Teknik Analisis Data**

### **1. Uji Asumsi Klasik**

Dengan adanya asumsi tersebut maka hasil yang diperoleh dikatakan mendekati atau sama dengan kenyataan yang akurat. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan benar terbebas dari gejala heteroskedastisitas, gejala autokorelasi dan gejala multikolinearitas. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

- a. Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Cara mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :
  - 1) Jika titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.
  - 2) Jika titik menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
- b. Uji multikolinieritas dilakukan untuk menunjukkan adanya hubungan linier antara variabel bebas dalam model regresi maupun untuk menunjukkan ada tidaknya derajat kolinearitas yang tinggi antara variabel-variabel bebas. Jika antar variabel berkorelasi dengan

sempurna maka disebut dengan multikolinearitas sempurna (*perfect multicollinearity*), berarti model kuadrat terkecil tersebut tidak bisa digunakan. Multikolinieritas dapat diketahui dengan menganalisis nilai toleransi serta *Variance Inflation Factor* (VIF). Suatu variabel dapat dikatakan terbebas dari asumsi multikolinieritas apabila nilai  $VIF > 10$  (Ghozali, 2013).

- c. Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji model regresi linier yang terdapat korelasi antara kesalahan. Menurut Jonathan Sarwono (2012:28) terjadi autokorelasi jika *durbin watson* sebesar  $< 1$  dan  $> 3$ .

Secara umum kriteria yang digunakan adalah:

- 1) Jika  $DU < DW < 4-DU$  maka  $H_0$  diterima, artinya terjadi autokorelasi
- 2) Jika  $DW < DL$  atau  $DW > 4-DL$  maka  $H_0$  ditolak, artinya tidak terjadi autokorelasi
- 3) Jika  $DL < DW$  atau  $4-DU < DW < 4-DL$ , artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

- d. Uji heteroskedastisitas merupakan cara untuk melihat adanya heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot antar nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Deteksi dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang sudah diperidksi, dan sumbu X adalah residual yang telah *studentized*. Dengan analisis dasar sebagai berikut:

- 1) Jika ada titik-titik membentuk pola dan teratur, maka dapat mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas.
- 2) Jika pola tidak terlihat jelas dan titik menyebar diatas dan dibawah nol, maka hal tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

## 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi bertujuan untuk memperkirakan atau meramalkan nilai satu variabel dalam hubungannya dengan variabel yang lain diketahui melalui persamaan garis regresi. Sedangkan regresi linier berganda merupakan dimana regresi variabel terikatnya dihubungkan dengan lebih dari satu variabel bebas tetapi masih menunjukkan diagram hubungan yang benar.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Rumus analisis regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Belanja Modal

$\alpha$  = Konstanta

b = Koefisien Regresi Berganda

X<sub>1</sub> = Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)

X<sub>2</sub> = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X<sub>3</sub> = Dana Alokasi Umum (DAU)

e = error

### 3. Uji Hipotesis

#### a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji hipotesis secara parsial berfungsi untuk menunjukkan pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan maka perlu dilakukan uji t. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini secara parsial adalah :

##### 1) Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap anggaran belanja modal.

$H_0 : \beta_1 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

$H_0$  ditolak jika *signifikan t* < 0,05

$H_a$  diterima jika *signifikan t* > 0,05

##### 2) Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal.

$H_0 = \beta_1 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

$H_0$  ditolak jika *signifikan t* < 0,05

$H_a$  diterima jika *signifikan t* > 0,05

3) Pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.

$H_0 = \beta_1 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ , artinya terdapat pengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

$H_0$  ditolak jika *signifikan*  $t < 0,05$

$H_a$  diterima jika *signifikan*  $t > 0,05$

b. Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dilakukan untuk menunjukkan apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , artinya tidak terdapat pengaruh signifikan secara simultan.

$H_a$  : minimal 1  $\neq 0$ , artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan.

Kriteria pengambilan keputusan adalah:

$H_0$  terima apabila  $F_{hitung} < t_{tabel}$  atau *sig*  $t > 0,05$

$H_0$  tolak apabila  $F_{hitung} > t_{tabel}$  atau *sig*  $t < 0,05$

c. Uji Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi merupakan suatu bilangan yang dinyatakan dalam persen (%) dan diperoleh dari bentuk kuadrat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).

Koefisien determinasi dapat dilihat dengan semakin tingginya  $R^2$  yang disesuaikan akan semakin baik bagi model regresi. Nilai koefisien bervariasi mulai dari 0 sampai 1, jika hasil mendekati 0 artinya kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel sangat terbatas. Tapi jika hasil mendekati 1 maka artinya variabel-variabel bebas memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Perkembangan Provinsi Sumatera Utara**

Provinsi Sumatera Utara yang berada bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1°- 4° lintang utara dan 98°-100° Bujur Timur, Luas daratan Provinsi Sumatera Utara 72.981,23 km<sup>2</sup>. Sumatera Utara pada dasarnya dibagi menjadi yaitu Pesisir Timur, Pegunungan Bukit Barisan, Pesisir Barat dan Kepulauan Nias.

Sebelah utara perbatasan dengan Provinsi Aceh dan Selat Malaka. Sebelah selatan perbatasan dengan Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Samudera Indonesia. Sebelah barat perbatasan dengan Provinsi Aceh dan samudera Indonesia, sedangkan sebelah timur perbatasan dengan Selat Malaka.

Pada zaman pemerintahan belanda Sumatera Utara merupakan suatu pemerintahan Gouvernement Van Sumatera, dengan wilayah meliputi seluruh Pulau Sumatera dan dipimpin oleh seorang Gubernur yang berkedudukan di Kota Medan. Setelah kemerdekaan dalam sidang pertama Komite Nasional daerah, Provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga bagian yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Utara merupakan penggabungan dari tiga daerah administratif yang sering disebut keresidenan terbagi menjadi keresidenan Aceh, keresidenan Sumatera Timur dan keresidenan Tapanuli.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1948 pada tanggal 15 April 1948 tentang Sumatera dibagi menjadi tiga provinsi yang masing-masing berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri. Selanjutnya tanggal 15 april tahun 1948 merupakan hari jadi Provinsi Sumatera Utara. Pada awal tahun 1949, dilakukan kembali reorganisasi pemerintah di Sumatera Utara, dengan Keputusan Pemerintah Darurat Republik Indonesia Nomor 22/Pem/PDRI pada tanggal 17 Mei 1949 jabatan Gubernur di tiadakan. Kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950, ketetapan tersebut dicabut dan dibentuk kembali Provinsi Sumatera Utara.

Pada tanggal 7 desember 1956, Di tetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang dibentuknya Daerah Otonom Provinsi Aceh, sehingga wilayah Provinsi Sumatera Utara sebagian menjadi wilayah Provinsi Aceh. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 menyebutkan bahwa Provinsi Sumatera Utara tersebut dalam ayat (1) yang wilayahnya telah dikurangi dengan bagian-bagian yang terbentuk sebagai daerah otonom Provinsi Aceh tetap disebut Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956, Provinsi Sumatera Utara terdiri atas 17 Kabupaten/Kota. Tetapi terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Toba Samosir, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padang Sidempuan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Humbang Hasundutan Dan Pakpak Barat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai, pada Tahun 2007 dibentuk Kabupaten Batu Bara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007, Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Undang-Undang 23 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Utara, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang pembentukan Kabupaten Nias Barat dan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunung Sitoli, dengan demikian Provinsi Sumatera Utara pada bulan Juli Tahun 2009 sudah menjadi 25 Kabupaten dan 8 Kota.

Adapun kabupaten yang ada di Sumatera Utara yaitu: Kabupaten Nias, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat. Sedangkan untuk wilayah kotanya yaitu: Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kota Tebing Tinggi, Kota Medan, Kota Binjai, Kota Padang Sidempuan, Kota Gunung Sitoli.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001, untuk membentuk dinas-dinas sebagai institusi teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dinas-dinas tersebut terdiri atas: Dinas Pertanian, Dinas Pertenakan, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kehutanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kesejahteraan dan Sosial, Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendapatan, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Pertambangan dan Energi serta Dinas Komunikasi dan Informasi.

## **2. Perekonomian Sumatera Utara**

Sumatera Utara kaya akan sumber daya alam yang berupa gas alam di daerah Tandam, Binjai dan minyak bumi di Pangkalan Brandan, serta Kabupaten Langkat yang telah dieksplorasi sejak zaman Hindia Belanda. Selanjutnya di Kuala Tanjung pada Kabupaten Asahan terdapat PT Inalum yang bergerak di bidang penambangan biji dan peleburan aluminium.

Sungai-sungai yang berhulu di pegunungan Danau Toba juga merupakan sumber daya alam yang cukup berpotensi untuk dieksploitasi menjadi sumber daya pembangkit listrik tenaga air. PLTA Asahan merupakan PLTA terbesar di Sumatera yang terdapat di Kabupaten Toba Samosir. Struktur perekonomian Sumatera Utara menurut lapangan usaha di dominasi oleh 3 lapangan usaha yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan, serta diikuti oleh industri pengolahan maupun perdagangan ecer-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang mengalami pertumbuhan yang tertinggi, karena diikuti oleh pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga dan pengeluaran konsumsi

pemerintah. Ekonomi Sumatera Utara mengalami kontraksi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh efek musiman beberapa komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan dari sisi pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada seluruh komponen.

### **3. Visi Dan Misi Provinsi Sumatera Utara**

Visi:

Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat.

Misi:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan takwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencarian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintah yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kalaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara bermartabat dalam pergaulan bebas dari judi, narkoba, prositusi, dan penyeludupan sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.

5. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan serta beradap.

#### 4. Deskripsi Variabel Penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33 Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Sumatera. Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan kriteria khusus pengambilan sampel dipilih sebanyak 7 Kabupaten dan 3 Kota, dengan periode penelitian dilakukan mulai pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017. Data penelitian secara keseluruhan berjumlah 40 sampel (10 Kabupaten/Kota X 4 Tahun laporan realisasi APBD). Adapun variabel penelitian yang diamati dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Pertumbuhan Ekonomi

Data variabel bebas ( $X_1$ ) dalam penelitian ini adalah Pertumbuhan

Ekonomi, berikut ini data variabel Pertumbuhan Ekonomi :

**Tabel 4.1 Pertumbuhan Ekonomi Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2014-2017 (dalam Rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab Langkat	27.769.540.000	30.351.770.000	33.949.470.000	37.023.330.000
2	Kab Nias	2.430.720.000	2.669.900.000	2.996.280.000	3.233.750.000
3	Kab Tapanuli Selatan	9.308.330.000	10.105.980.000	10.946.770.000	11.983.060.000
4	Kab Simalungun	25.338.490.000	27.237.460.000	30.186.080.000	32.860.290.000
5	Kab Asahan	24.302.720.000	26.541.790.000	29.206.690.000	32.023.190.000
6	Kab Karo	13.817.090.000	15.150.360.000	16.728.420.000	18.060.750.000
7	Kab Dairi	6.268.080.000	6.823.160.000	7.433.620.000	8.044.630.000
8	Kota Binjai	7.643.410.000	8.447.410.000	9.077.470.000	9.857.850.000
9	Kota Tebing Tinggi	3.934.670.000	4.304.350.000	4.727.480.000	5.123.220.000
10	Kota Sibolga	3.426.510.000	3.827.170.000	4.262.850.000	4.644.670.000

Sumber : Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi terletak di Kabupaten Langkat sebesar Rp. 37.023.330.000, sedangkan pertumbuhan ekonomi terendah terletak pada Kabupaten Nias sebesar Rp. 2.430.720.000. Jika pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi menurun, maka pendapatan daerah akan mengalami penurunan sehingga pemerintah daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

#### **b. Pendapatan Asli Daerah**

Data variabel bebas ( $X_2$ ) dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli

Daerah, berikut ini data variabel Pendapatan Asli Daerah:

**Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2014-2017 (dalam Rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab Langkat	107.811.975.547	122.715.359.910	132.673.213.413	30.094.966.025
2	Kab Nias	65.082.210.841	70.892.590.608	82.840.434.009	63.612.593.279
3	Kab Tapanuli Selatan	95.588.202.103	109.349.451.811	76.640.675.841	47.990.183.868
4	Kab Simalungun	96.390.208.715	111.893.282.770	132.560.800.826	33.014.568.195
5	Kab Asahan	91.468.218.559	98.279.308.429	52.170.348.430	30.373.280.934
6	Kab Karo	72.914.095.471	87.644.277.141	99.913.302.299	40.831.129.979
7	Kab Dairi	53.525.854.131	58.791.848.521	68.003.241.760	37.587.326.567
8	Kota Binjai	71.967.137.635	78.327.792.811	97.339.497.584	27.476.734.295
9	Kota Tebing Tinggi	74.515.273.852	82.410.053.810	94.058.491.717	48.469.208.035
10	Kota Sibolga	52.922.967.441	60.486.785.863	68.537.902,708	34.557.335.546

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel diatas pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi. Pendapatan asli daerah tertinggi terletak di Kabupaten Langkat sebesar Rp. 132.673.213.413, sedangkan pendapatan asli daerah terendah terletak di Kota

Binjai sebesar Rp. 27.476.734.295. Pendapatan asli daerah menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat. Di Tahun 2017 Pemerintah Daerah tidak dapat membiayai daerahnya sendiri dan sangat bergantung pada dana perimbangan.

### c. Dana Alokasi Umum

Data variabel bebas ( $X_3$ ) dalam penelitian ini adalah Dana Alokasi

Umum, berikut ini data variabel Dana Alokasi Umum:

**Tabel 4.3 Dana Alokasi Umum Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2014-2017 (dalam Rupiah)**

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab Langkat	1.039.650.946.000	1.099.486.754.000	1.200.481.463.000	700.280.826.000
2	Kab Nias	347.698.829.000	365.879.173.000	429.582.510.000	244.748.649.576
3	Kab Tapanuli Selatan	572.097.968.000	592.764.058.000	654.669.272.000	327.334.626.000
4	Kab Simalungun	1.077.985.764.000	1.084.973.726.000	1.230.816.187.000	717.976.084.000
5	Kab Asahan	795.350.930.000	817.746.952.000	891.746.952.000	519.837.726.000
6	Kab Karo	686.834.562.000	697.458.392.000	751.581.176.000	432.159.157.800
7	Kab Dairi	532.723.259.000	560.602.194.000	623.702.235.000	356.030.010.400
8	Kota Binjai	526.069.678.000	541.895.577.000	574.469.158.000	287.234.568.000
9	Kota Tebing Tinggi	385.030.433.000	400.236.724.000	432.437.231.464	250.514.423.065
10	Kota Sibolga	371.812.825.000	380.075.078.000	412.805.887.000	230.483.276.300

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel diatas dana alokasi umum mengalami fluktuasi. Dana alokasi umum tertinggi terletak di Kabupaten Simalungun sebesar Rp. 1.230.816.187.000, sedangkan dana alokasi umum terendah terletak di Kabupaten Nias sebesar Rp. 244.784.649.576. Penurunan dana alokasi umum terjadi karena adanya devisa APBN yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut berimbas pada perhitungan ulang alokasi dana kegiatan setiap dinas.



#### d. Belanja Modal

Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah Belanja Modal, berikut ini

data variabel Belanja Modal:

**Tabel 4.4 Belanja Modal Realisasi Penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara 2014-2017**

(dalam Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
1	Kab Langkat	392.542.794.732	497.257.525.402	626.295.461.427	88.205.126.357
2	Kab Nias	158.098.310.646	194.330.739.832	227.559.502.344	14.158.331.979
3	Kab Tapanuli Selatan	222.350.225.386	303.915.012.639	307.152.296.664	28.273.492.918
4	Kab Simalungun	226.370.774.680	185.676.905.078	210.953.244.334	66.934.738.889
5	Kab Asahan	424.188.251.104	227.438.269.630	237.676.952.256	16.608.028.489
6	Kab Karo	155.665.020.656	300.098.182.224	231.098.360.315	177.085.388
7	Kab Dairi	155.712.106.277	180.098.060.210	217.941.187.120	5.151.073.950
8	Kota Binjai	153.284.846.162	174.972.076.727	202.943.191.598	17.052.109.995
9	Kota Tebing Tinggi	163.582.124.045	158.487.242.001	203.355.262.407	51.822.942.740
10	Kota Sibolga	105.880.982.815	126.724.781.839	185.382.143.913	13.193.244.825

Sumber : Data diperoleh dari Kementerian Keuangan Sumatera Utara, 2019

Berdasarkan tabel diatas belanja modal mengalami fluktuasi. Belanja modal tertinggi terletak di Kabupaten Langkat sebesar Rp. 626.295.461.427, sedangkan belanja modal terendah terletak di Kabupaten Karo sebesar Rp. 177.085.388. Belanja modal perlu didorong untuk pencapaian target pertumbuhan ekonomi dalam rentang sesuai APBN. Penurunan belanja modal akan mempengaruhi pembangunan atau perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, serta penambahan atau perbaikan dan mesin.

## 5. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan data dalam penelitian ini yang mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. Mulai dari minimum, maksimum, mean dan standar deviasi dalam metode ini menggunakan bantuan aplikasi SPSS yang dapat dilihat pada tabel deskriptif sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Statistik Deskriptif**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Log_X1	40	9.39	10.57	10.0132	.36922
Log_X2	40	10.44	11.12	10.8337	.18605
Log_X3	40	11.36	12.09	11.7375	.19721
Log_Y	40	8.25	11.80	11.0444	.65088
Valid N (listwise)	40				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS versi 17.0

Dari hasil data statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa jumlah data N sebanyak 40 sampel, sedangkan nilai valid N sebesar 40 menunjukkan banyaknya jumlah sampel yang dapat digunakan. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum sebesar Rp. 2.430.720.000, hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Nias pada tahun 2014. Sedangkan nilai terbesar maksimum pertumbuhan ekonomi sebesar Rp.37.023.330.000, hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Langkat pada tahun 2017. Nilai standar deviasi pertumbuhan ekonomi sebesar 0.36922 lebih kecil dari mean sebesar 10.0132 hal ini menunjukkan distribusi data cenderung normal.

Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp.27.476.734.295, hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah terendah di Kota Binjai tahun 2017. Sedangkan nilai terbesar maksimum pendapatan asli daerah sebesar Rp.132.673.213.413, hasil penelitian menunjukkan pendapatan asli daerah tertinggi di Kabupaten Langkat tahun 2016. Nilai standar deviasi sebesar 0.18605 lebih kecil dari mean sebesar 10.8337 hal ini menunjukkan distribusi data cenderung normal.

Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar Rp.230.483.276.300, hasil penelitian menunjukkan dana alokasi umum terendah di Kota Sibolga tahun 2017. Sedangkan nilai terbesar maksimum dana alokasi umum sebesar Rp.1.200.481.463.000, hasil penelitian ini menunjukkan dana alokasi umum tertinggi di Kabupaten Simalungun tahun 2016. Nilai standar deviasi dana alokasi umum sebesar 0.19721 lebih kecil dari mean sebesar 11.7375 hal ini menunjukkan distribusi data cenderung normal.

Belanja Modal memiliki nilai minimum sebesar Rp.177.085.388, hasil penelitian menunjukkan belanja modal terendah di Kabupaten Karo tahun 2017. Sedangkan nilai terbesar maksimum belanja modal sebesar Rp.626.295.461.427, hasil penelitian menunjukkan belanja modal tertinggi di Kabupaten Langkat tahun 2016. Nilai standar deviasi belanja modal sebesar 0.65088 lebih kecil dari mean sebesar 11.0444 hal ini menunjukkan distribusi data cenderung normal.

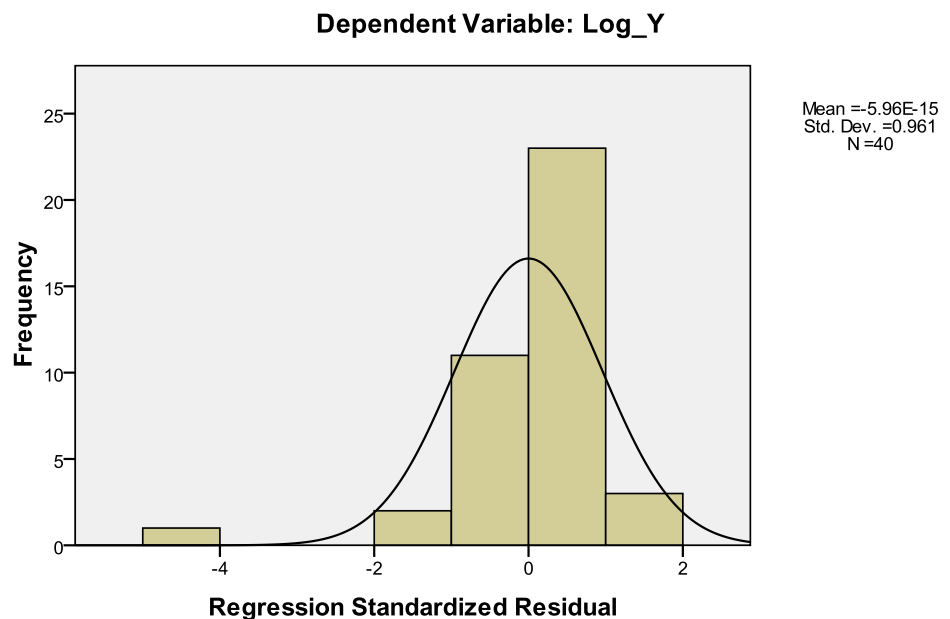
## 6. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah penelitian memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menginterpretasi hasil dari analisis regresi dan diperoleh adanya ketetapan model. Dalam pengujian asumsi klasik digunakan asumsi-asumsi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas.

### a. Uji Normalitas Data

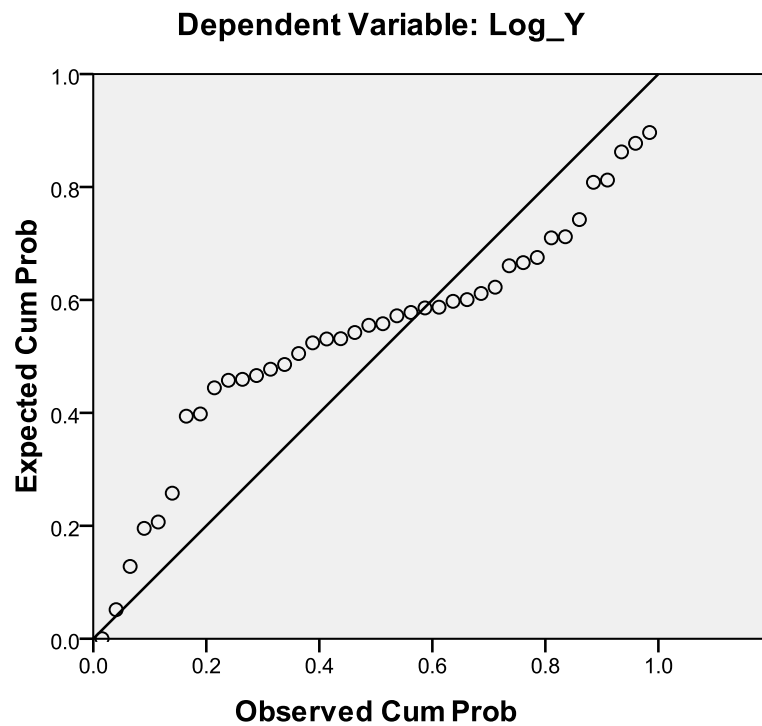
Uji normalitas dilakukan untuk menguji model regresi yang dibentuk dari variabel dependen dan variabel independen yang mempunyai distribusi normal.

Berikut ini adalah gambar dari hasil uji normalitas yaitu:



**Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram**

Sumber : Hasil pengolahan Data SPSS vesri 17.0



**Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plot**

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS (2019)

Berdasarkan gambar P-Plot diatas dapat diketahui bahwa data yang digunakan sebagai sampel penelitian normal. Karena pada gambar terdapat titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal atau tidak terpencar jauh dari garis diagonal. Penyebaran mengikuti arah garis diagonal, maka dapat dinyatakan normal sehingga memenuhi asumsi normalitas.

#### **b. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Berikut ini adalah hasil pengolahan yang menggunakan uji multikolinearitas yaitu:

Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>											
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	-22.476	4.607		-4.879	.000					
	Log_X1	-1.399	.415	-.794	-3.373	.002	.079	-.490	-.347	.192	5.219
	Log_X2	.538	.612	.154	.879	.385	.684	.145	.091	.346	2.888
	Log_X3	3.553	.945	1.076	3.759	.001	.535	.531	.387	.129	7.727

a. Dependent Variable: Log\_Y

Sumber : Hasil Pengolaan Data SPSS versi 17.0

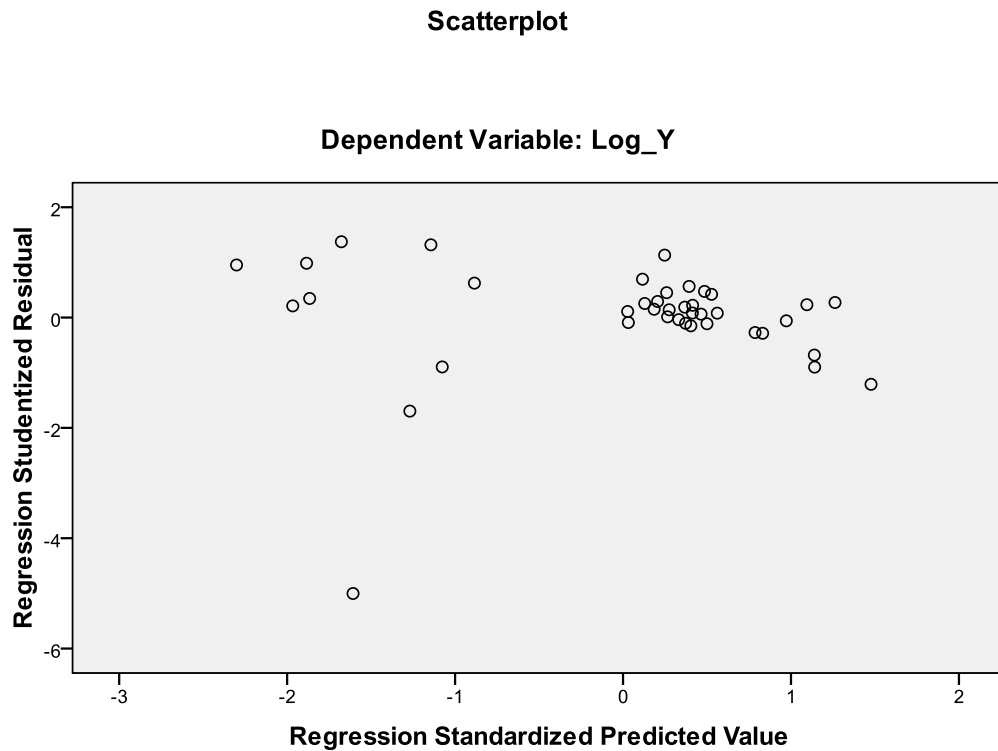
Berdasarkan tabel *coefficients* tersebut diatas terlihat bahwa seluruh variabel bebas (Independen) yaitu Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai *Tolerance* sebesar  $0.192 > 0,1$  dengan angka *Variance Inflation Factors* (VIF) sebesar  $5.219 < 10$ . Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai *Tolerance* sebesar  $0.346 > 0,1$  dengan angka *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar  $2.888 < 10$ . Dana Alokasi Umum memiliki nilai *Tolerance* sebesar  $0.129 > 0,1$  dengan angka *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar  $7.727 > 10$ .

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah merupakan model yang terbentuk terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> dalam model regresi.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Berikut ini adalah hasil dari pengolahan uji heteroskedastisitas yaitu:



**Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot**

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS versi 17.0

Gambar *Scatterplot* menunjukkan titik-titik yang dihasilkan menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola atau trend garis tertentu. Gambar di atas menunjukkan bahwa sebaran data di sekitar titik 0 pada sumbu Y. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa model regresi ini bebas dari masalah heteroskedastisitas, dengan tujuan lain variabel-variabel akan diuji dalam penelitian ini bersifat homoskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

**Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Of the Estimate	Durbin-Watson
1	.768 <sup>a</sup>	.618	.586	.41875	1.850

- a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum  
 b. Dependent Variabel: Belanja Modal  
 Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS versi 17.0

Dari tabel diatas pada kolo nilai *Durbin-Watson* yang dihasilkan dari model regresi adalah sebesar 1.850 dari tabel Durbin Watson dan jumlah data (n)=40 dan K=3 (K adalah jumlah variabel bebas) diperoleh nilai dL sebesar 2.662 dan dU sebesar 2.982. berdasarkan aturan pengambilan keputusan terjadi autokorelasi atau tidak di atas, maka nilai DW dalam penelitian sebesar 1.850 yaitu berada diantara  $DW > 4-dl$  ( $1.850 > 1.338$ ). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian tidak terdapat autokorelasi atau  $H_0$  ditolak.

### 7. Pengujian Test Goodness Of fit

#### a. Model Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk menguji sejauh mana dan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun hasil dari regresi linier berganda yaitu:

**Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-22.476	4.607		-4.879	.000
Pertumbuhan Ekonomi	-1.399	.415	-.794	-3.373	.002
Pendapatan Asli Daerah	.538	.612	.154	.879	.0385
Dana Alokasi Umum	3.553	.945	1.076	3.759	.001

Sumber : Hasil Pengolaan Data SPSS versi 17.0



Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 17.0 diatas maka didapat persamaan regresi linier berganda model regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{BM = -22.476 -1.399 PDB + 0.538 PAD + 3.553 DAU}$$

Keterangan:

BM (Y) = Belanja Modal

PDB (X<sub>1</sub>) = Pertumbuhan Ekonomi

PAD (X<sub>2</sub>) = Pendapatan Asli Daerah

DAU (X<sub>3</sub>) = Dana Alokasi Umum

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien PDB, PAD dan DAU

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dianalisis pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah:

- 1) Jika segala sesuatu pada variabel-variabel inpeden dianggap konstan maka nilai belanja modal (Y) adalah sebesar -22.476.
- 2) Jika pertumbuhan ekonomi terus ditingkatkan sebesar 1 satuan maka belanja modal (Y) akan menurun (lambang negatif) sebesar -1.399 satuan
- 3) Jika pendapatan asli daerah terus ditingkatkan sebesar 1 satuan maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 0.538 satuan.
- 4) Jika dana alokasi umum terus ditingkatkan sebesar 1 satuan maka belanja modal (Y) akan meningkat sebesar 3.553 satuan.

### b. Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terkait variabel terikat. Berikut adalah hasil dari pengolahan uji f yaitu:

**Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik ANOVA**

Model	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	10.210	3	3.403	19.409	.000 <sup>a</sup>
Residual	6.313	36	.175		
Total	16.522	39			

a. Predictors: (Constant), PDB, PAD, DAU

b. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS versi 17.0

Dari tabel ANOVA di atas dapat diketahui hasil uji F adalah dengan melihat nilai F hitung pada kolom F yaitu sebesar  $19.409 > 2.85$  ( $F_{tabel} = n-k-1$ ), dan nilai signifikan yang dapat dilihat pada nilai Sig sebesar  $0.000 < 0.05$ , artinya bahwa Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum bersama-sama berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Belanja Modal.

### c. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji t dalam penelitian ini menggunakan tingkat variabel 5%, variabel independen dikatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai sig (p-Value) di bawah 5%.

**Tabel 4.10 Hasil Uji t statistik**

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-22.476	4.607		-4.879	.000		
Pertumbuhan Ekonomi	-1.399	.415	-.794	-3.373	.002	.192	5.219
Pendapatan Asli Daerah	0.538	.612	.154	.879	.385	.346	2.888
Dana Alokasi Umum	3.553	.945	1.076	3.759	.001	.129	7.727

a. Dependent Variabel: Belanja Modal

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS versi 17.0

Dari tabel di atas dapat diketahui hasil uji t yaitu dengan melihat t hitung sebagai berikut:

- 1) Nilai uji t hitung Pertumbuhan Ekonomi sebesar  $-3.373 < 2.14$  ( $n-k-1$ ) kemudian nilai sig  $0.002 < 0.05$ , sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- 2) Nilai t hitung Pendapatan Asli Daerah sebesar  $0.879 < 2.14$  ( $n-k-1$ ) kemudian nilai sig  $0.385 > 0.05$ , sehingga  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima, artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
- 3) Nilai t hitung Dana Alokasi Umum sebesar  $3.759 < 2.14$  ( $n-k-1$ ) kemudian nilai sig  $0.001 < 0.05$ , sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, artinya dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

#### d. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tujuan pengujian koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat.

**Tabel 4.11 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.786 <sup>a</sup>	.618	.586	.41875	1.850

a. Predictors: (constant), Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum

b. Dependent: Belanja Modal

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS versi 17.0

Hasil nilai R sebesar 0.786 sebagai nilai korelasi berganda artinya pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum memiliki keeratan hubungan yang tinggi dengan belanja modal. Nilai R Square dan

Adjusted R Square mewakili nilai koefisien determinasi, namun dalam regresi berganda lebih tepat menggunakan nilai Adjusted R Square sebesar 0.586 atau 58.6%. Artinya variasi dari belanja modal mampu dijelaskan sebesar 58.6% oleh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum. Sedangkan sisanya 41.4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model atau tidak diteliti seperti dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak dan dana bukan bagi hasil pajak.

## **A. Pembahasan**

### **1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal**

Pelaksanaan desentralisasi fiskal, menunjukkan bahwa potensi fiskal pemerintah daerah antara satu dengan yang lain bisa jadi sangat beragam. Perbedaan ini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang beragam pula, sehingga pemberian otonomi yang lebih besar akan memberikan dampak lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih efisien dalam memberikan kepentingan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Pungky (2011) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi diikuti oleh belanja modal yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan pertumbuhan ekonomi justru mengalami peningkatan, tetapi sebaliknya data belanja modal mengalami penurunan.

### **2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal**

Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini konsisten dengan hasil oleh Pungky (2011). Pemerintah daerah sebaiknya harus

menggali potensi kekayaan daerahnya tersebut, dengan begitu maka daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah yang tinggi. Semakin besar upaya memaksimalkan pendapatan asli daerah yang dilakukan suatu daerah, maka semakin besar pula kewenangan pemerintah daerah tersebut dalam melaksanakan kebijakannya. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Daerah yang sah bertujuan untuk memberikan keleluasaan pemerintah daerah dalam membiayai belanja modalnya, selain menggunakan transfer dari pemerintah pusat mereka juga bisa menggunakan dananya sendiri yaitu pendapatan asli daerah.

### **3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal**

Pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan fiskalnya melalui pendapatan asli daerah yang lebih besar. Melihat potensi Kabupaten Langkat yang kaya akan kekayaan alam serta letaknya yang strategis bagi perekonomian yang didukung dengan jumlah penduduk yang banyak dan luas dapat meningkatkan pendapatan dan disisi lain akan menambah kebutuhan daerah. Dana Alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Hasil ini juga konsisten dengan riset yang dilakukan oleh Fitria (2013) yang menyatakan bahwa adanya indikasi belanja modal sangat ditentukan oleh faktor dana alokasi umum, untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka otonomi daerah. Dari olah data dan hasil yang diperoleh dana alokasi umum yang diterima oleh daerah hanya diperuntukkan untuk membiayai belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil analisis yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t hitung sebesar  $-3.373$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0.002$ , dimana nilai sig di di bawah  $0.05$ , sehingga variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.
2. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel pendapatan asli daerah memiliki nilai t hitung sebesar  $0.879$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0.385$  dimana nilai sig diatas  $0.05$ , sehingga variabel pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.
3. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan variabel dana alokasi umum memiliki t hitung sebesar  $3.759$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0.001$ , dimana nilai sig di bawah  $0.05$ , sehingga dana alokasi umum berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal.
4. Dari pengujian yang dilakukan juga diperoleh f hitung sebesar  $19.409$  dengan tingkat signifikansi  $0.000$  jauh lebih kecil dari  $0.05$ . Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil simpulan yang diperoleh dari penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1.

Untuk meningkatkan belanja modal pemerintah daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sebaik mungkin untuk membiayai pengeluaran. Agar tingkat ketergantungan pemerintah daerah akan berkurang.

2. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah maka pemerintah seharusnya memberikan kinerja yang baik agar pendapatan yang diperoleh akan besar, dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

3. Agar dana alokasi umum bisa di minimalisirkan maka pemerintah daerah diharapkan agar lebih menggali lagi potensi kekayaan daerahnya, dengan begitu daerah tersebut tidak akan berkegantungan dana terhadap pemerintah pusat.

4. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, maka harus ada kebijakan-kebijakan di sektor ekonomi daerah seperti kebijakan pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia dengan dipacunya kebijakan tersebut akan meningkatkan pendapatan nasional daerah .

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Atika, D. Saraswati, H Chrisna, HAP Nasution, S Pipit Buana (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol* 9 (9), 1531-1544
- Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta
- Ardhani Pungki. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah*, Skripsi, Universitas Diponegoro
- Arif Purnama. 2014. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten di Jawa Tengah Periode 2012-2013* Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Badan Pusat Statistik. 2010. *Pertumbuhan Ekonomi*. Sumatera Utara
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Daulay, M. T., Elfindri, Sjafrizal, & Sofyardi. (2018). 1. An Empirical Investigation of Business Diversification and Economic Value on Poverty in Batubara Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 841-859.
- Daulay, M. T., Sanny, A., Rini, E. S., & Sadalia, I. (2018). FACTORS THAT INFLUENCING THE SATISFACTION AND LOYALTY OF SILKAIR INTERNATIONAL FLIGHT SERVICE PASSENGERS AT KUALANAMU AIRPORT, DELI SERDANG, INDONESIA. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* , 1-10.
- Erlina, Omar Sakti Rambe, dan Rusdianto. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponogoro
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015. *Pernyataan Standar Pemerintah*
- Kesuma, M. A., Lubis, S., Iskandarini, & Daulay, M. T. (2019). The Influence Of Organizational Restructuring On Employee Performance In The Housing And Residential Areas, North Sumatra Province, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 32-36.



- Keweder Warsito, dkk. 2008 “*Akuntansi Sektor Publik*”. Semarang : Undip
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Megwati Sularno, Fitria. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*, Universitas Diponegoro
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government*. In *International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2017 *Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2017 *Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018*
- Prasetyo, P.Eko. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi: sebuah pengetahuan tingkat dasar dan menengah serta advanced untuk ilmu ekonomi makro*. Yogyakarta
- PSAP No. 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Rusiadi, dkk. 2014. *Metode Penelitian : Usu Press Sugiyono*. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. CV Alfabeta
- Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Keuangan Pusat dan Daerah*
- Yoga permana, Deva. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Semarang*, Universitas Diponegoro

Zain, Mohammad. 2010. *Himpunan Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta. PT. Indeks

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.djk.kemenkeu.go.id](http://www.djk.kemenkeu.go.id)

[www.sumutprov.go.id](http://www.sumutprov.go.id)